



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. Sudirman No.1 Kota Payakumbuh Telepon 0752-92418, Faks 0752-92172
e-mail: dinaskesehatankablimapuluhkota@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR:440/ 49 /DISKES.1/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PERSONIL PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022, perlu disusun struktur pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam DPA-OPD Tahun Anggaran 2022 yang mengandung pengadaan barang/jasa diperlukan organisasi pengadaan barang/jasa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pengadaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan personil pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dengan suatu Keputusan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor G3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016, Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 92);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk personil pejabat pengadaan barang dan jasa untuk paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini
- KEDUA** : Menunjuk personil pejabat pengadaan barang dan jasa untuk paket pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paket pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) di lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Menunjuk personil Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di lingkungan Dinas Kesehatan untuk jangka waktu satu tahun anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3 yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA mempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut:
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan **E-purchasing** yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KELIMA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 24 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
/Selaku Pengguna Anggaran/


dr.H.ADEL NOFIARMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196509141998031002

- Tembusan:** disampaikan kepada Yth;
1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
 2. Inspektur Kab. Lima Puluh Kota di Srilamak
 3. Yang Bersangkutan
 4. Arsip -----

LAMPIRAN. 1 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 440/ 248 /Diskes.1/2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PERSONIL PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

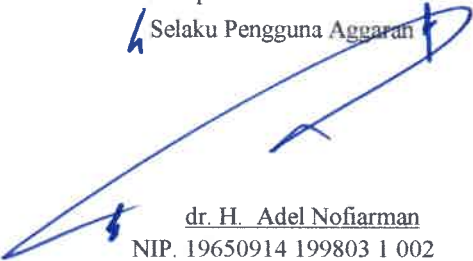
**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA
DENGAN NILAI DI ATAS 50 JUTA RUPIAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN	PEJABAT PENGADAAN
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA			
	A. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	A.1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
	1. Pengadaan Pusling Roda 2	175.000.000	E -Purchasing/ PL	Nama : Ns. JALIUS, S.Kep. NIP : 196703291989121001/ III.d
	4 Pengadaan Mebel Puskesmas Muaro Paiti	25.000.000	E -Purchasing/ PL	Nama : Ns. JALIUS, S.Kep. NIP : 196703291989121001/ III.d
	5 Pengadaan Mebel Puskesmas Padang Kandis	40.000.000	E -Purchasing/ PL	Nama : Ns. JALIUS, S.Kep. NIP : 196703291989121001/ III.d
	2. Pengadaan Peralatan Sistem Informasi (PC All IN ONE)	180.000.000	E -Purchasing	Nama : Eria Erwin,S.Si,Apt NIP : 197107072002121005/ IV.a
	3. Pengadaan Peralatan Sistem Informasi (Headset dan Webcam Full HD)	15.000.000	E -Purchasing	Nama : Eria Erwin,S.Si,Apt NIP : 197107072002121005/ IV.a
	A.2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
	1. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Mampu PONED (Set Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal)	617.000.000	E -Purchasing	Nama : Ns. JALIUS, S.Kep. NIP : 196703291989121001/ III.d
	2. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Mampu PONED (Set Obsgyn)	267.450.000	E -Purchasing	Nama : Ns. JALIUS, S.Kep. NIP : 196703291989121001/ III.d
	3. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Mampu PONED (Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak)	295.810.000	E -Purchasing	Nama : Ns. JALIUS, S.Kep. NIP : 196703291989121001/ III.d
	4. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Mampu PONED (Set Perawatan Pasca Persalinan)	151.950.000	E -Purchasing	Nama : Ns. JALIUS, S.Kep. NIP : 196703291989121001/ III.d
	5. Pengadaan Alkes (SILPA DAK)	250.800.000	E -Purchasing	Nama : Ns. JALIUS, S.Kep. NIP : 196703291989121001/ III.d
	6. Pengadaan Peralatan Antropometri	1.160.640.000	E -Purchasing/ PL	Nama : Ns. JALIUS, S.Kep. NIP : 196703291989121001/ III.d
	7. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (Set Gawat Darurat, Termasuk EKG)	1.008.750.000	E -Purchasing	Nama : Eria Erwin,S.Si,Apt NIP : 197107072002121005/ IV.a
	8. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (Set Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal)	863.800.000	E -Purchasing	Nama : Eria Erwin,S.Si,Apt NIP : 197107072002121005/ IV.a
	9. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (Set Obsgyn)	374.430.000	E -Purchasing	Nama : Eria Erwin,S.Si,Apt NIP : 197107072002121005/ IV.a
	10. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak, Termasuk IVA Test)	299.150.000	E -Purchasing	Nama : Eria Erwin,S.Si,Apt NIP : 197107072002121005/ IV.a

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN	PEJABAT PENGADAAN
1	2	3	4	5
	11. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (Set Perawatan Pasca Persalinan)	212.730.000	E -Purchasing	Nama : Eria Erwin,S.Si,Apt NIP : 197107072002121005/ IV.a
	12. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (Set Laboratorium)	782.500.000	E -Purchasing	Nama : Eria Erwin,S.Si,Apt NIP : 197107072002121005/ IV.a
	13 Pengadaan USG 2D Digital	660.000.000	E -Purchasing	Nama : Eria Erwin,S.Si,Apt NIP : 197107072002121005/ IV.a
	A.3 Pengadaan Obat, Vaksin			
	1. Penyediaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan primer	1.949.625.000	E -Purchasing	Nama : RIKA FITRI YENI NIP : 198212092006042005/ III.d
	A.4 Pengadaan Bahan Habis Pakai			
	1. Pengadaan BMHP gula Darah	96.096.000	E -Purchasing	Nama : Eria Erwin,S.Si,Apt NIP : 197107072002121005/ IV.a
	2 Pengadaan Carridge TCM	816.259.000	E -Purchasing	
	3 Penyediaan BMHP untuk pelayanan kesehatan primer	956.307.000	E -Purchasing	

Ditetapkan di Payakumbuh, ,
pada tanggal : 24 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Selaku Pengguna Anggaran


dr. H. Adel Nofiarman
NIP. 19650914 199803 1 002

LAMPIRAN. 2 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 440/ 48 /Diskes.1/2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2022

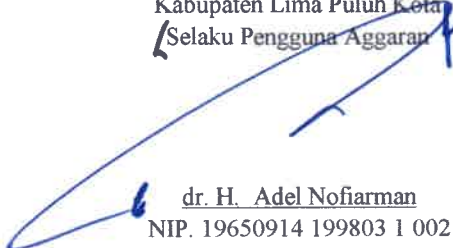
TENTANG : PENUNJUKAN PERSONIL PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN NILAI S.D 200 JUTA RUPIAH
DAN JASA KONSULTANSI DENGAN NILAI S.D 100 JUTA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PEJABAT PENGADAAN
1	2	3	4
A	Pekerjaan Konstruksi		
1	Pengadaan Prasarana Air Bersih (DAK)	143.000.000	Nama : RUDI, S.Pd, M.Si NIP/ Gol : 19800808 200501 1 002/ III.c
2	Lanjutan Rehab Poskesri Jorong III Koto Bangun	182.700.000	Nama : MELWANTO, ST NIP/ Gol : 19631006 198703 1 007/ IV.b
3	Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Muaro Paiti	90.440.000	Nama : RENI FITRI,S.Si, M.Si NIP/ Gol : 19760922 201001 2 006/ III.d
4	Rehab Poskesri Andiang	43.500.000	Nama : MELWANTO, ST NIP/ Gol : 19631006 198703 1 007/ IV.b
5	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	40.000.000	Nama : HENDRA PERMANA, S.Sos NIP/ Gol : 19701012 200701 1 005/ III.c
B	Jasa Konsultan Perencanaan Konstruksi		
1	Jasa Konsultan Desain Perencanaan Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas Mahat (DAK)	70.000.000	Nama : JUSLINARTI, ST NIP/ Gol : 19750716 200801 2 003/ III.d
2	Jasa Konsultan Desain Perencanaan Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas Muaro Paiti (DAK)	70.000.000	Nama : SYUKRI BADRI, S.Sos NIP/ Gol : 19830910 200901 1 004/ III.d
3	Jasa Konsultan Desain Perencanaan Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas Pakan Rabaa (DAK)	70.000.000	Nama : RENI FITRI,S.Si, M.Si NIP/ Gol : 19760922 201001 2 006/ III.d
4	Jasa Konsultan Desain Perencanaan Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas Pangkalan (DAK)	70.000.000	Nama : JUSLINARTI, ST NIP/ Gol : 19750716 200801 2 003/ III.d
5	Jasa Konsultan Desain Perencanaan Pengadaan Prasarana Air Bersih (DAK)	9.000.000	Nama : SYUKRI BADRI, S.Sos NIP/ Gol : 19830910 200901 1 004/ III.d
6	Jasa Konsultan Desain Perencanaan Konstruksi Rehab Poskesri Andiang	5.000.000	Nama : DESY EFENDI,ST, M.Si NIP/ Gol : 19801227 200501 2 007/ III.c
7	Jasa Konsultan Desain Perencanaan Konstruksi Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Muaro Paiti	9.000.000	Nama : DESY EFENDI,ST, M.Si NIP/ Gol : 19801227 200501 2 007/ III.c
8	Jasa Konsultan Desain Perencanaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	4.500.000	Nama : SYUKRI BADRI, S.Sos NIP/ Gol : 19830910 200901 1 004/ III.d
C	Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi		
1	Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas Mahat (DAK)	56.000.000	Nama : BENNY HANIF, S.Pi NIP/ Gol : 19800928 200501 1 003/ III.c
2	Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas Muaro Paiti (DAK)	56.000.000	Nama : BENNY HANIF, S.Pi NIP/ Gol : 19800928 200501 1 003/ III.c
3	Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas Pakan Rabaa (DAK)	56.000.000	Nama : RAHMAN ALIFSYAH, S.Kom NIP/ Gol : 19810723 200901 1 005/ III.b
4	Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas Pangkalan (DAK)	56.000.000	Nama : RAHMAN ALIFSYAH, S.Kom NIP/ Gol : 19810723 200901 1 005/ III.b
5	Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Pengadaan Prasarana Air Bersih (DAK)	7.000.000	Nama : BONI PUTRA, S.Sos, MM NIP/ Gol : 19820123 200501 1 001/ III.c
6	Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Lanjutan Rehab Poskesri Jorong III Koto Bangun	11.291.499	Nama : HENDRA PERMANA, S.Sos NIP/ Gol : 19701012 200701 1 005/ III.c

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PEJABAT PENGADAAN
1	2	3	4
7	Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Rehab Poskesri Andiung	3.750.000	Nama : BONI PUTRA, S.Sos, MM NIP/ Gol : 19820123 200501 1 001/ III.c
8	Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Muaro Paiti	6.750.000	Nama : HENDRA PERMANA, S.Sos NIP/ Gol : 19701012 200701 1 005/ III.c
9	Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	3.500.000	Nama : BONI PUTRA, S.Sos, MM NIP/ Gol : 19820123 200501 1 001/ III.c

Ditetapkan di Payakumbuh,
pada tanggal : 24 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota
(Selaku Pengguna Anggaran)


dr. H. Adel Nofiarman
NIP. 19650914 199803 1 002

LAMPIRAN 3. KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 440/ 48 /Diskes.1/2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PERSONIL PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGADAAN UNTUK PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA DENGAN NILAI S/D 50 JUTA RUPIAH

NO	NAMA/ NIP/ GOL	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1	<p>Nama : ERIA ERWIN,S.Si, Apt NIP : 197107072002121005 Gol : IV.a</p>	<p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DINAS KESEHATAN)</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DINAS KESEHATAN) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (DINAS KESEHATAN) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DINAS KESEHATAN)</p> <p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (DINAS KESEHATAN) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DINAS KESEHATAN)</p>	<p>BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</p>

NO	NAMA/ NIP/ GOL	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS KESEHATAN)	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS KESEHATAN)	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS KESEHATAN)	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (DINAS KESEHATAN)	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (DINAS KESEHATAN)	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS KESEHATAN)	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KESEHATAN)	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS KESEHATAN)	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS KESEHATAN)	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (DINAS KESEHATAN)	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (DINAS KESEHATAN)	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KESEHATAN)	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS KESEHATAN)	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS KESEHATAN)	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS KESEHATAN)	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS KESEHATAN)	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS KESEHATAN)	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KESEHATAN)	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS KESEHATAN)	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KESEHATAN)	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS KESEHATAN)	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS KESEHATAN)	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KESEHATAN)	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS KESEHATAN)	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (DINAS KESEHATAN)	

NO	NAMA/ NIP/ GOL	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4
2	Nama : RIKA FITRI YENI NIP : 198212092006042005 Gol : II.d	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (DINAS KESEHATAN)</p> <p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengembangan Puskesmas (DINAS KESEHATAN) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (DINAS KESEHATAN) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN) Pengadaan Obat, Vaksin (DINAS KESEHATAN) Pengadaan Bahan Habis Pakai (DINAS KESEHATAN) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN)</p> <p>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</p> <p>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (DINAS KESEHATAN)</p> <p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DINAS KESEHATAN) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (DINAS KESEHATAN) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (DINAS KESEHATAN)</p>	<p>BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN</p> <p>BIDANG PELAYANAN KESEHATAN</p>

Ditetapkan di Payakumbuh,
 pada tanggal 24 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 Selaku Pengguna Anggaran

dr. H. Adel Nofiarman
 NIP. 19650914 199803 1 002